

Strategi penurunan pengangguran di Indonesia: tinjauan kebijakan dan implementasi

Nancy Herninda Liasari

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *nancyherninda@gmail.com

Kata Kunci:

Strategi, pengangguran, Indonesia, tinjauan, kebijakan, implementasi

Keywords:

Strategy, unemployment, Indonesia, review, policy, implementation

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran. melalui hal yang mendalam terhadap kebijakan, peraturan, dan program terkait, studi ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengkaji efektivitas kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran secara keseluruhan. Hal ini memiliki tinjauan terhadap strategi penurunan pengangguran di Indonesia, melalui

studi literatur dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, hal ini mengusulkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan demografi yang tepat. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh Indonesia, dalam mengatasi permasalahan ini, perlu beberapa strategi yang berkelanjutan dan dapat dipertimbangkan seperti, peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengatasi tantangan yang ada. Selain itu juga penting untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

ABSTRACT

This study analyses various efforts that have been and are being made by the Indonesian government to reduce unemployment. Through an in-depth look at related policies, regulations and programs, this study identifies strengths, weaknesses and gaps in the implementation of these policies. To examine the effectiveness of policies in creating new jobs, improving the quality of the workforce, and reducing the overall unemployment rate. This provides an overview of strategies for reducing unemployment in Indonesia, through literature studies and quantitative and qualitative data analysis, it can identify factors that influence the unemployment rate and evaluate various policies that have been implemented. In addition, it proposes more sustainable policy recommendations to overcome the problem of unemployment in Indonesia by considering appropriate economic, social and demographic conditions. Unemployment is one of the complex problems faced by Indonesia, in overcoming this problem, several strategies are needed that are sustainable and can be considered, such as improving the quality of human resources, creating new jobs, and overcoming existing challenges. Apart from that, it is also important to continue to evaluate and adapt to changing economic and social conditions.

Pendahuluan

Strategi berasal dari istilah Yunani "strategeia," yang berarti seni atau ilmu dalam kepemimpinan militer (dari kata "stratos" yang berarti militer dan "ag" yang berarti memimpin). Secara umum, strategi dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana yang digunakan untuk mengalokasikan serta menerapkan kekuatan militer dan sumber daya material di area tertentu dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas, strategi tidak hanya berlaku dalam bidang militer, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lain seperti bisnis dan manajemen, di mana pengambilan keputusan dan perencanaan yang tepat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan.

Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (1970: hal. 71), kebijakan (*policy*) diterapkan untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik yang terarah. Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich (1963 : hal. 79) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan tertentu yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang menghadirkan tantangan dan peluang bagi pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan khusus. Sedangkan menurut James E. Anderson (1979: hal. 3), kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan tertentu, diikuti oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku untuk menyelesaikan suatu masalah.

Pengangguran merupakan persoalan yang sangat rumit bagi suatu negara, provinsi, dan juga pemerintah kota atau kabupaten. Indonesia sebagai negara berkembang, menempati posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah populasi terbanyak di dunia. Berdasarkan data *worldometers*, pada April 2019, Indonesia tercatat memiliki populasi sebanyak 269 juta jiwa atau yang setara dengan 3,49 % dari total populasi dunia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya membawa berbagai dampak dan menimbulkan beragam permasalahan kependudukan di Indonesia. Salah satu masalah besar yang tak dapat dihindari dari kondisi ini adalah meningkatnya angka pengangguran, di mana kebutuhan akan lapangan kerja semakin tinggi namun ketersediaan peluang pekerjaan tidak sebanding.

Pengangguran memiliki dua dampak, yaitu dampak terhadap perekonomian negara serta terhadap individu dan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara dapat menghambat pencapaian target pembangunan ekonomi. Kondisi ini membuat tujuan pembangunan yang telah direncanakan menjadi sulit untuk dicapai. Selain itu, dampak pengangguran juga dirasakan oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian, menurunkan keterampilan, serta berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik (Muhdar, 2015).

Pada terminologi ekonomi, pengangguran mengacu pada kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pengangguran juga mencakup individu yang hanya bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu atau yang belum menemukan pekerjaan yang memenuhi standar kelayakan (Mankiw, Quah & Wilson, 2006). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan tenaga kerja, kemajuan teknologi, ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lokasi tempat tinggal yang jauh, persaingan di pasar global, serta kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja (Franita, 2016).

Pendekatan yang menekankan pada kebijakan pemerintah merupakan sarana penelitian penting dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Akan tetapi,

keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada desain, implementasi, dan evaluasi yang tepat. Hal ini akan membahas lebih menyeluruh dalam berbagai kebijakan yang telah dan sedang diterapkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

Pembahasan

Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang ingin dan mampu bekerja, namun tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Pada permasalahan ini, orang yang menganggur termasuk dalam kelompok angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Di setiap negara, tingkat pengangguran dapat diukur dengan menghitung persentase penduduk aktif yang mencari kerja. Sebuah negara dapat mencapai kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) ketika tingkat pengangguran pada negara tersebut rendah, sekitar 4% dari total angkatan kerja. Indonesia sendiri berupaya menekan angka pengangguran serendah mungkin.

Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Keberadaan lapangan pekerjaan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan program pendidikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain, semakin sedikitnya peluang kerja yang tersedia dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menunjukkan bahwa program-program pendidikan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Pengangguran seolah-olah menjadi musuh bagi negara, mengapa hal itu bisa terjadi? Pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan, sehingga penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kesejahteraan.

Pada tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan, masalah kesehatan, angka putus sekolah yang tinggi, meningkatnya kriminalitas, serta ketidakstabilan politik, keamanan, dan sosial. Apabila dibiarkan, pengangguran akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibatnya jangka panjang dari pengangguran yaitu menurunnya produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan perkapita suatu negara. Di suatu negara mengupayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan dengan mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat proses pembangunan dan pertumbuhan desa karena berkurangnya penerimaan dan rendahnya produktivitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 7,04 juta jiwa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2017 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,01 juta jiwa, jumlah tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,02 juta jiwa. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran yang terbuka tercatat mencapai 5,33%. Angka tersebut

lebih tinggi dibandingkan pada februari 2017 sebesar 5,05%. Pengangguran tertinggi tercatat di wilayah perkotaan dengan angka sebesar 6,5%.

Pemerintah memang sulit untuk memecahkan masalah pengangguran. Pemerintah juga harus mempertimbangkan peran Pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Tingkat Pendidikan harus ditingkatkan oleh negara yang ingin berubah. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi diperoleh melalui Pendidikan yang berkontribusi pada pengangguran angka pengangguran. Pengangguran adalah hal yang tidak diinginkan akan tetapi banyaknya faktor yang mempengaruhinya, masih menjadi masalah di beberapa negara. Untuk menurangi pengangguran, Lembaga Pendidikan, masyarakat, dan lain-lain harus bekerja sama. Beberapa faktor penyebab pengangguran:

1. Pertumbuhan penduduk yang cepat, semakin banyak lulusan muda yang masih menganggur dan harus menunggu kesempatan kerja. Situasi ini muncul ketika jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja lebih cepat daripada tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga mereka terpaksa menunggu hingga kesempatan yang sesuai tersedia.
2. Kesenjangan Pendidikan, kurangnya tingkat pendidikan dan kemampuan.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
4. Keterbatasan keterampilan, kurangnya keterlibatan industri.
5. Persaingan ketat, persaingan dalam pasar global terutama dari perusahaan asing yang lebih memiliki pekerja dari negara mereka sendiri.
6. Pergantian musim, pengangguran musiman yang terjadi akibat pergantian musim.
7. Krisis ekonomi, menyebabkan pengangguran siklis, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi selama masa krisis tersebut.
8. Kurangnya modal untuk berinvestasi, hal ini bisa diakibatkan oleh krisis finansial yang memporak-porandakan perekonomian nasional.
9. Tekanan untuk bekerja cenderung lebih rendah, bagi pemuda akan mendapat tekanan untuk mendapatkan pekerjaan lebih rendah
10. Tekanan untuk bekerja yang lebih rendah, tekanan untuk bekerja bagi pemuda lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua

Tiga jenis pengangguran menurut sukirno (2006) yaitu:

1. Pengangguran friksional yang terjadi Ketika ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh.
2. Pengangguran struktural yang terjadi karen perubahan dalam komposisi atau struktur ekonomi.
3. Pengangguran teknologi yang disebabkan oleh pengganti tenaga kerja manusia oleh mesin dan bahan kimia karena kemajuan teknologi.

Dampak

Perekonomian Indonesia aat ini mengalami pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri. Dengan pertumbuhan industri yang lebih pesat, diharapkan perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih baik, mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia. (Faizal, n.d.)

Pengangguran berdampak pada tingkat perekonomian negara, stabilitas politik, minat investor, serta kondisi sosial dan mental masyarakat. Pengangguran membawa berbagai konsekuensi, beberapa efek signifikan yang ditimbulkan antara lain (Riska Frinita, 2016):

- a. Dari perspektif ekonomi, pengangguran dapat memperburuk tingkat kemiskinan karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan akan mengalami penurunan pendapatan, sementara biaya hidup terus meningkat. Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.
- b. Dari perspektif sosial, meningkatnya angka pengangguran dapat menyebabkan bertambahnya jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan, termasuk meningkatnya jumlah pengemis, tunawisma, dan pengamen. Kesulitan dalam mencari pekerjaan mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian dan perampokan, demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kriminalitas.
- c. Dari segi perspektif psikologis, terlalu banyak pengangguran dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan diri, keputusan yang tidak yakin, dan depresi.
- d. Dari perspektif politik, tingginya angka pengangguran dapat memicu banyak demonstrasi yang mengganggu stabilitas politik. Serikat pekerja mungkin merasa terdorong untuk melakukan aksi protes sebagai respons terhadap meningkatnya pengangguran.
- e. Dari segi perspektif keamanan, tingginya angka pengangguran dapat mendorong individu yang menganggur untuk melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, atau melakukan penipuan.
- f. Banyaknya pengangguran juga dapat memicu peningkatan jumlah pekerja seks komersial di kalangan generasi muda yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- g. Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk segera mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan, dan setiap wilayah harus mampu berkembang secara mandiri.

Cara pemerintah mengatasi pengangguran

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah pengangguran. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mencari solusi yang efektif dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Langkah-langkah tersebut melibatkan program-program strategis dan kebijakan yang dirancang untuk menjadi solusi yang baik bagi pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus menyediakan informasi pekerjaan yang akurat melalui berbagai media, termasuk dengan jujur. Lapangan kerja disediakan oleh pemerintah untuk diambil pekerjaan atau lulusan sekolah atau universitas untuk mencegah pengangguran. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan bisnis yang membutuhkan karyawan baik pekerjaan. Pasti pemetaan para pencari kerja harus menggunakan detail agar pekerjaan yang tersedia dapat memenuhi dan mengimbangi kebutuhan pencari pekerjaan.

Kedua, pemerintah dapat menyediakan program pelatihan kerja gratis bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Program ini tidak hanya ditujukan bagi pencari kerja umum, tetapi sebaiknya dirancang secara terstruktur dan dimulai sejak usia sekolah atau universitas. Pelatihan tersebut dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dengan lembaga

pendidikan dan pelatihan di sekitar masyarakat. Pelatihan kerja sangat penting, terutama bagi individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, karena mereka cenderung memerlukan keterampilan khusus untuk bersaing di dunia kerja. Walaupun mungkin belum memiliki kemampuan atau keterampilan yang relevan dengan kemajuan teknologi, masyarakat dan universitas perlu terus mengembangkan kapasitas diri. Menurut Franita dan Riska (2016), pelatihan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan agar pencari kerja dapat mencapai kemandirian. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk merespons dengan cepat kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan jumlah pelatihan yang tersedia bagi mereka yang membutuhkannya di seluruh Indonesia.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan pengawasan terhadap program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan semangat kewirausahaan di masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk mendukung akses terhadap pendidikan gratis dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas tinggi, karena dalam proses pendidikan, pencari kerja memperoleh berbagai informasi dan keterampilan yang membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri (Frinata, Riska, 2016). Dengan kata lain, pemerintah harus meningkatkan semangat kewirausahaan bagi warga negara Indonesia. Memikirkan tidak semua orang senang dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di kantor. Akibatnya pemerintah harus membantu mereka yang memiliki semangat bisnis sehingga kelompok mereka dapat menemukan pekerjaan yang diberikan oleh negara.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan dan mendorong literasi informasi yang menyeluruh dan bersifat sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya upaya ini, masyarakat yang aktif mencari informasi berkualitas dan ingin mengembangkan keterampilan dapat mengakses informasi secara mandiri. Pengetahuan yang diperoleh dari buku atau media lain dapat memperkaya wawasan dan relevan dengan keterampilan mereka, sehingga masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan kemampuan baru yang bermanfaat. Pemerintah harus memperhatikan berbagai inisiatif yang disampaikan penulis tersebut. Implementasi pemerintah mengimbangi ketersediaan lahan hubungan kerja dengan pencari kerja saat ini. Pemerintah harus bertindak dalam masalah pengangguran di Indonesia, mengingat populasi meningkatnya pengangguran setiap tahunnya. Apabila pengangguran dapat diselesaikan maka kondisi ekonomi Indonesia dapat berkembang memburuk dan rakyat Indonesia memiliki kemampuan untuk lebih berkualitas tinggi dan dapat bekerja sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang memiliki keinginan dan kemampuan untuk bekerja, namun tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Di Indonesia, pengangguran menjadi masalah yang serius karena dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga stabilitas ekonomi dan keamanan

sosial secara keseluruhan, menjadikan pengangguran sebagai tantangan besar yang harus diatasi. Pemerintah harus berusaha mengatasi pengangguran melalui peningkatan pendidikan, pelatihan kerja, dan promosi kewirausahaan. Ini akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja berkualitas tinggi, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi pengangguran, termasuk menyediakan informasi pekerjaan yang akurat, memberikan pelatihan kerja gratis, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempromosikan literasi informasi. Dengan demikian, diharapkan pengangguran dapat berkurang dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Dewita Hia, Y. (2015). STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN. *Economica*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Hariyanto, E., Madya, W. A., Keuangan, P., & Bppk, U. (n.d.). PENGANGGURAN DAN KRISIS EKONOMI. <http://indonesiabaik.id/infografis/tingkat-pengangguran-menurun>
- Ibnu Dinar, M., Sifa, N., Islam Bandung, U., & Author, C. (2022). STRATEGI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN AKIBAT COVID-19 DI KELURAHAN SUKAGALIH KOTA BANDUNG (Vol. 26).
- Ishak, O. K., & Sy, M. E. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DAN INFLIKASINYATERHADAP INDEK PEMBANGUNAN DI INDONESIA.
- Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran, A., Yosuky, D., Santono, felix, Sania, T., Ladi, B.-S., Gajah Mada, J., Indah, T., Sekupang, K., & Batam, K. (2022). Universitas International Batam. Desember, 1(4), 181–187.
- Ketenagakerjaan, M., Pengangguran, D., Suharnanik, S., & Km, M. S. (n.d.). BUKU AJAR PENERBIT UWKS PRESS.
- Lestari, D. S. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengagguran di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
- Meningkatkan, U., Belajar, M., Suharni, S., Program,), Bimbingan, S., & Konseling, D. (2018). Dipublikasikan Oleh: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(1).
- Nurrahman, A. (n.d.). UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENGANGGURAN DI INDONESIA.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID 19 (Vol. 1).
- Tito Permadhy, Y. (n.d.). PADA DESA BOJONGCAE, CIBADAK LEBAK PROVINSI BANTEN.